

BAB II

Gambaran Umum Wilayah Penelitian

A. Kondisi Geografis Kota Yogyakarta

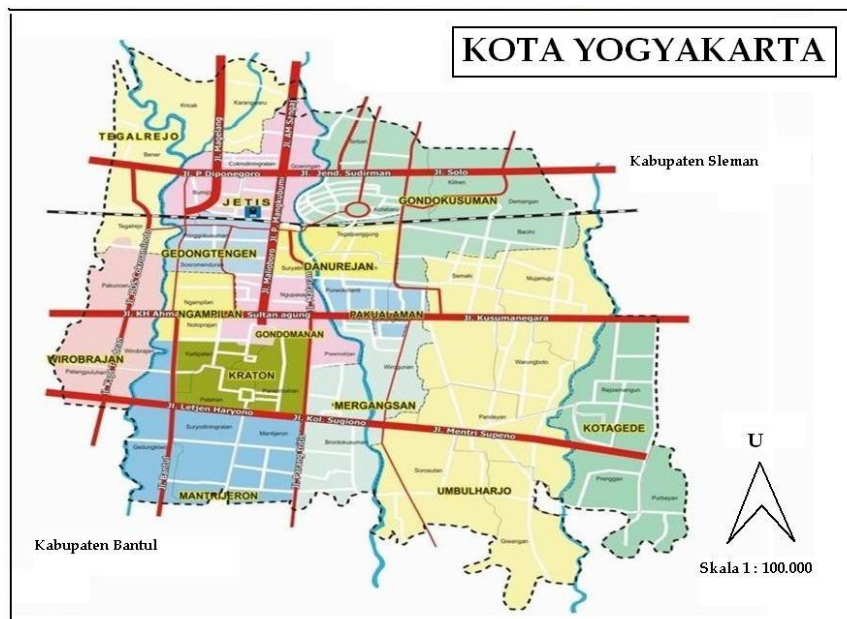
1. Letak Wiayah

Kota Yogyakarta terletak antara 110°24'19''-110°28'53'' Bujur Timur dan antara 07°49'26''-07°15'24'' Lintang Selatan, dengan luas sekitar 32,5 Km² atau 1,02% dari luas wilayah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Jarak terjauh dari utara ke selatan kurang lebih 7,5 Km dan barat ke timur kurang lebih 5,6 Km.

Kota Yogyakarta yang terletak di daerah dataran lereng aliran gunung merapi memiliki kemiringan lahan yang relatif datar (antara 0-2%) dan berada pada ketinggian rata-rata 114 meter dari permukaan air laut (dpa). Sebagian wilayah dengan luas 1.657 hektar terletak pada ketinggian kurang dari 100 meter dan sisanya (1.539 hektar) berada ketinggian antara 100-199 meter dpa. Sebagian besar jenis tanahnya adalah regosol.

Terdapat 3 sungai yang mengalir dari arah utara ke selatan yaitu : Sungai Gajahwong yang mengalir dibagian timur kota, Sungai Code dibagian tengah, dan Sungai Winongo dibagian barat kota.

Gambar 2.1 Peta Yogyakarta



2. Luas Wilayah

Kota Yogyakarta memiliki luas wilayah tersempit dibandingkan dengan daerah tingkat II lainnya, yaitu 32,5 Km² yang berarti 1,025% dari luas wilayah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Dengan luas 3.250 tersebut menjadi 14 kecamatan, 45 kelurahan, 617 RW dan 2.531 RT. Kondisi tanah kota Yogyakarta cukup subur dan memungkinkan ditanami berbagai tanaman pertanian maupun perdagangan, disebabkan oleh letaknya yang berada didataran lereng gunung merapi (fluvis volcanic foot plain) yang garis besarnya mengandung tanah regosol atau tanah vulkanis muda.

Dari 14 kecamatan yang ada di kota Yogyakarta, kecamatan Umbulharjo memiliki jumlah wilayah atau luas area paling luas yaitu 261, sedangkan kecamatan Pakualaman memiliki luas area paling kecil yakni 63.

Table 2.1
Luas Wilayah, Jumlah RT dan RW menurut Kecamatan dan kelurahan
di Kota Yogyakarta 2011

Kecamatan	Kelurahahan	Luas Area	Jumlah RT	Jumlah RW
MANTRIJERON	1.Gedongkiwo	0,90	18	86
	2.Suryodiningratan	0,85	17	69
	3.Mantrijeron	0,86	20	75
		2,61	55	230
KRATON	1.patehan	0,40	10	44
	2.Penembahan	0,66	18	78
	3.Kadipaten	0,34	15	53
		1,40	43	175
MERANGSAN	1.Brontokusuman	0,93	23	83
	2.Keparakan	0,53	13	57
	3.Wirogunan	0,85	24	76
		2,31	60	216
UMBULHARJO	1.Giwangan	1,26	13	42
	2.Sorosutan	1,68	16	63
	3.Pandean	1,38	12	49
	4.Warungboto	0,83	9	38
	5.Tahunan	0,78	11	48
	6.Muja-Muju	1,53	12	55
	7.Semaki	0,66	10	34
	8,12	83	329	
KOTAGEDE	1.Prenggan	0,99	13	57
	2.Purbayan	0,83	14	58
	3.Rejowinangun	0,25	13	49
		3,07	40	164
GONDOKUSUMAN	1.Baciro	1,03	21	87
	2.Demangan	0,74	12	44
	3.Klitren	0,68	16	63
	4.Kotabaru	0,71	4	20
	5.Terban	0,80	12	59
	3,97	65	273	
DANUREJAN	1.Suryatmajan	0,28	15	45
	2.Tegalpanggung	0,35	16	66
	3.Bausasran	0,47	12	49
		1,10	43	160
PAKUALAMAN	1.Purwokinanti	0,33	10	47
	2.Gunungketur	0,30	9	36
		0,63	19	83
GONDOMANAN	1.Prawirodirjan	0,67	18	61
	2.Ngupasan	0,45	13	49
		1,12	31	110

NGAMPILAN	1.Notoprajan	0,37	8	50
	2.Ngampilan	0,45	13	70
		0,82	21	120
WIROBRAJAN	1.Patangpuluhan	0,44	10	51
	2.Wirobrajan	0,67	12	58
	Pakuncen	0,65	12	56
		1,76	34	165
GEDONGTENGEN	1.Peringgokusuman	0,46	14	54
	2.Sosromendurann	0,50	23	89
		0,96	37	143
JETIS	1.Bumijo	0,59	13	56
	2.Gowongan	0,47	13	52
	3.Cokrodiningratan	0,66	11	60
		1,72	37	168
TEGALREJO	1.Tegalrejo	0,82	7	25
	2.Bener	0,57	12	46
	3.Kricak	0,82	13	61
	4.Karangwaru	0,70	14	56
		2,91	46	188
JUMLAH	45	32,50	614	2.524

Sumber : BPS Kota Yogyakarta

3. Topografi

Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta terletak di bagian selatan tengah pulau Jawa yang dibatasi oleh Samudra Hindia di bagian selatan dan Provinsi Jawa Tengah di bagian lainnya. Batas dengan Provinsi Jawa Tengah meliputi :

- Kabupaten Wonogiri di bagian tenggara
- Kabupaten Klaten di bagian timur laut
- Kabupaten Magelang di bagian barat laut
- Kabupaten Purworejo di bagian barat

Secara astronomis, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta terletak antara 70° 33' LS - 8° 12' LS dan 110° 00' 50' BT. Komponen fisiografi yang menyusun Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta terdiri dari 4 satuan

fisiografis yaitu satuan pegunungan selatan (datran tinggi karst) dengan ketinggian tempat berkisar antara 150-700 meter, satuan gunung merapi dengan ketinggian tempat berkisar antara 80-2.911 meter, satuan dataran rendah yang membentang antara pegunungan selatan dan pegunungan kulonprogo pada ketinggian 0-80 meter, dan pegunungan kulonprogo dengan ketinggian hingga 572 meter.

Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta mempunyai luas 3.185,80km², terdiri dari 4 kabupaten dan 1 kota, Yaitu Kota Yogyakarta, Kabupaten Sleman, Kabupaten Bantul, Kabupaten Gunungkidul, dan Kabupaten Kulonprogo. Setiap kabupaten atau kota mempunyai kondisi fisik yang berbeda sehingga potensi alam yang tersedia juga tidak sama perbedaan kondisi fisik ini ikut menentukan dalam rencana pengembangan daerah.

Potensi air tanah dan keberadaan air permukaan satu daerah tidak sama dengan daerah lainnya walaupun keduanya mempunyai curah hujan yang sama. Hal ini disebabkan kondisi lahan (geologi, geomorfologi, dan tanah) setiap daerah berbeda. Perbedaan-perbedaan ini akhirnya membawa keberagaman dalam potensi sumberdaya alam dan potensi kebencanaan alam sehingga antara pengembangan sumberdaya alam daerah harus memperhatikan potensi-potensi alam tersebut. Pengembangan suatu potensi sumberdaya alam harus memperhatikan sifat dari sumberdaya yang akan dikembangkan, yaitu apakah sumberdaya alam tersebut berupa cadangan (tak terbaharui, misalnya tambang mineral atau buatan) atau sebagai sumberdaya alam yang terbaharui (terbaharui, misalnya biota). Dengan kata lain,

pengembangan sumberdaya alam harus memperhatikan kesinambungan pemanfaatan dan kelestarian lingkungan. Kekeliruan pengembangan sumberdaya alam selain berdampak pada degradasi sumberdaya alam bersangkutan juga berperan dalam memicu terjadinya bencana alam yang berakibat sangat merugikan.

4. Kondisi Demografi Kota Yogyakarta

Berdasarkan hasil sensus penduduk 2010 jumlah penduduk tahun 2010 tercatat 388.627 orang. Komposisi penduduk berdasarkan jenis kelamin adalah 48.67% laki-laki dan 51.33% perempuan. Secara keseluruhan jumlah penduduk perempuan lebih tinggi dibandingkan dengan penduduk laki-laki seperti tampak dari rasio jenis kelamin penduduk yang lebih kecil dari 100, dimana pada tahun 2010 sebesar 94.81.

Jumlah penduduk Kota Yogyakarta pada tahun 2011 sebanyak 390.554 orang dengan rincian sebanyak 190.075 orang penduduk laki-laki dan 200.479 orang penduduk perempuan. Rasio jenis kelamin adalah perbandingan antara banyaknya penduduk laki-laki dengan penduduk perempuan pada suatu daerah dan waktu tertentu. Biasanya dinyatakan dengan banyaknya penduduk laki-laki untuk 100 penduduk perempuan. Dengan luas wilayah 32,50 km², kepadatan penduduk Kota Yogyakarta 12.017 jiwa per km². kepadatan penduduk di Kota Yogyakarta termasuk kedalam kategori padat penduduk.

Table 2.2
Kepadatan dan Pertumbuhan Penduduk Kota Yogyakarta Hasil Sensus
Penduduk dan SUPAS 1971-2010

Tahun	JumlahPenduduk (jiwa)	Kepadatan (jiwa/km²)	Pertumbuhan Penduduk (%)
1971	340.908	10.489	0,90
1980	398.192	12.252	1,72
1990	412.059	12.679	0,35
1995	418.944	12.891	0,33
2000	397.398	12.228	-0,37
2005	435.236	13.392	1,87
2010	388.627	11.958	-2,24

Sumber : BPS Kota Yogyakarta

Kepadatan dan pertumbuhan penduduk Kota Yogyakarta hasil sensus penduduk dan SUPAS 1971-2010 berdasarkan pengamatan hasil table diatas cenderung meningkat ditiap tahunnya.

Table 2.3
Penduduk Menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin di Kota Yogyakarta

Kelompok Umur	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
0 – 4	13.207	12.390	25.597
5 – 9	12.917	12.224	25.141
10 – 14	13.058	12.302	25.360
15 – 19	18.773	21.123	39.896
20 – 24	24.600	25.762	50.362
25 – 29	18.831	17.312	36.143
30 – 34	15.043	14.847	29.890
35 – 39	13.624	14.087	27.711
40 – 44	13.164	14.505	27.669
45 – 49	11.974	13.531	25.505
50 – 54	10.948	11.923	22.871
55 – 59	8.392	8.941	17.333
60 – 64	4.916	5.864	10.780
65 – 69	3.965	5.170	9.135
70 – 74	3.095	4.510	7.605
75+	3.568	5.988	9.556
Jumlah	190.075	200.479	390.554

Sumber : BPS Kota Yogyakarta

Penduduk menurut kelompok umur dan jenis kelamin di Kota Yogyakarta paling tinggi jumlahnya terdapat pada kelompok umur 20-24 dengan jumlah 50.362 orang, dengan persentase jumlah laki-laki 24.600 orang dan perempuan 25.762 orang. Sedangkan jumlah penduduk menurut kelompok umur paling rendah terdapat pada kelompok umur 70-74 dengan jumlah total 7.605 dengan persentase jumlah laki-laki 3.095 orang dan perempuan 4.510 orang.

5. Kondisi Sosial Politik Kota Yogyakarta

Sejak resmi lahirnya Kota Yogyakarta pada tanggal 13 Februari 1947, terdapat 9 orang Walikota yang menjabat sebagai kepala daerah tingkat II di bawah Gubernur. Walikota Yogyakarta yang pertama adalah M. Enoch (Mei 1947-Juli 1947) dan dilanjutkan oleh Mr. Soedarisman Poerwokoesoemo (Juli 1947-Januari 1966). Walikota Yogyakarta yang ketiga adalah Soedjono A. Y. yang menjabat selama sepuluh tahun, yaitu pada (Januari 1966-November 1975). Kemudian pengabdian Soedjono dilanjutkan oleh Walikota keempat yaitu H. Ahmad pada periode (November 1975-Mei 1981). Periode berikutnya adalah Soegiarto (1981-1986) satu periode. Djatmiko D pada (1986-1991) satu periode. R. Widagdo dua periode (1991-2001). Herry Zudianto juga menjabat dua periode kepemimpinannya yaitu pada (2001-2011). Sedangkan untuk periode 2011 hingga sekarang kursi Walikota Yogyakarta di jabat oleh Drs. H. Haryadi Suyuti.

B. GAMBARAN UMUM KOMISI PEMILIHAN UMUM (KPU) KOTA YOGYAKARTA

1. Anggota KPU

Perekrutan anggota KPU Kota Yogyakarta dibentuk melalui seleksi yang menunjuk pada SK Wakikota tentang pembentukan Tim Seleksi anggota KPUD. Adapun calon-calon anggota yang dapat mencalonkan diri adalah :

- a) Non Partisan
- b) Jika seorang PNS, maka bersedia melepas semua jabatannya, baik struktural maupun fungsional.

Pada tahap penyeleksian, para calon diminta untuk menggambarkan visi dan misinya sebanyak 5 lembar HVS dan setelah persyaratan administratifnya selesai, maka pemuda mengumumkan calon-calon tersebut kepada masyarakat sehingga masyarakat dapat berperan langsung dalam memberi opini atau laporan-laporan terkait calon-calon tersebut. Dan untuk hal ini diberikan waktu 5 hari. Tahap akhir seleksi adalah Fit and Propert test yang kemudian menghasilkan 10 orang yang kemudian disusutkan menjadi 5 orang dengan sistem pergantian antar waktu dengan lama kontrak 5 tahun.

Kompisisi personalia KPU Kota Yogyakarta periode 2008-2013 merupakan komposisi kepengurusan yang menjalankan tahapan verifikasi Parpol calon peserta Pemilu 2014 di Kota Yogyakarta. Dengan diketuai oleh bapak Nasrullah S.H.,S.Ag.,M.CL yang juga merupakan seorang dosen Fakultas Hukum di Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY) hingga tahapan vertifikasi Parpol sebagai calon peserta Pemilu tahun 2004 selesai dan

sampai pada penetapan Parpol yang memenuhi syarat dan yang tidak memenuhi syarat. Kemudian kepengurusan ini dilanjutkan oleh komposisi personalia yang baru untuk periode 2013-2018.

Kemudian untuk komposisi personalia kepengurusan periode 2013-2018 ini diketuai oleh bapak Wawan Budiyanto, S.Ag, MSI yang merupakan anggota dari kepengurusan periode sebelumnya mempunyai jabatan divisi umum, rumah tangga dan organisasi dalam tahapan verifikasi Parpol calon peserta Pemilu 2014.

2. Tugas dan Fungsi KPU Kabupaten atau Kota

a. Tugas

1. Merencanakan penyelenggaraan Pemilu.
2. Menetapkan organisasi dan tata cara semua tahapan pelaksanaan Pemilu.
3. Mengkoordinasikan, menyelenggarakan, dan mengendalikan semua tahapan pelaksanaan pemilu.
4. Menetapkan peserta Pemilu.
5. Menetapkan daerah pilihan, jumlah kursi dan calon Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota.
6. Menetapkan waktu, tanggal, tata cara pelaksanaan kampanye, dan pemungutan suara.
7. Menetapkan hasil pemilu dan mengumumkan calon terpilih Anggota, DPR, DPD, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota.
8. Melakukan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan Pemilu.
9. Melakukan tugas dan kewenangan lain yang diatur undang-undang.

b. Fungsi

1. Penyusunan program dan anggaran Pemilu di Kabupaten/Kota.
2. Pemberian pelayanan teknis pelaksanaan penyelenggaraan Pemilu di Kabupaten/Kota.
3. Pemberian pelayanan administrasi yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, anggaran, dan perlengkapan.
4. Perumusan dan penyusunan bantuan serta penyelesaian masalah dan sengketa hukum.
5. Pemberian dan pelayanan informasi Pemilu, partisipasi masyarakat dan penyelenggarakan hubungan masyarakat bagi keperluan pemilihan umum di Kabupaten/Kota.
6. Pengelolaan data Pemilu di Kabupaten/Kota.
7. Pengelolaan logistik dan distribusi barang atau jasa keperluan pemilihan umum.
8. Pelaksanaan kerjasama antar lembaga.
9. Penyusunan laporan penyelenggara kegiatan atau pertanggung jawaban KPU Kabupaten/Kota.